

BAB I

KONDISI UMUM

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPM, PTSP dan Naker) Kabupaten Tuban dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. DPM, PTSP dan Naker Kabupaten Tuban, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pelayanan publik pada saat ini menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena tingkat kualitas pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dari berbagai aspek kehidupan. Untuk itu upaya reformasi birokrasi pelayanan menjadi agenda yang mutlak dilakukan. Upaya reformasi di bidang perizinan ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Penerapan sistem perizinan secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) sebagai langkah Pemerintah dalam rangka percepatan investasi (penanaman modal) di daerah. Dengan menerapkan sistem OSS tersebut maka investor akan mendapatkan berbagai kemudahan. Sistem OSS terintegrasi dengan sistem pelayanan pemerintahan yang telah ada, mencakup Nomor Induk Kependudukan, pengesahan pendirian badan usaha dan lainnya. OSS merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan data ke dalam pusat database (NSS), pelayanan terpadu satu pintu dan sistem dari kementerian/lembaga terkait lainnya.

Pemerintah melaksanakan sistem perizinan secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) mulai April 2018. Lewat kebijakan ini maka terjadi perubahan paradigma bagi Pemerintah yang semula sebagai pemberi perizinan berubah menjadi

pelayan perizinan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini diharapkan akan ada standar perizinan yang sama untuk semua daerah. Tidak ada lagi duplikasi perizinan.

Sampai dengan Bulan Desember 2019, jumlah perizinan usaha di Kabupaten Tuban yang sudah terbit sejumlah 5.875 izin. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik dibandingkan dengan jumlah izin yang telah diterbitkan pada tahun 2018 yaitu sejumlah 7.916 izin.

Selain urusan Penanaman Modal dan Perizinan, DPM, PTSP dan Naker Kabupaten Tuban juga mengampu urusan Ketenagakerjaan khususnya bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan bidang Hubungan Industrial.

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional menunjukkan angka 5,13% pada Bulan Februari 2018. Sedangkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tuban Tahun 2019 menurun sebesar 2,76%.

Namun demikian, tingkat pengangguran ini sayangnya masih bisa dikatakan cukup banyak bila dilihat dari jumlah (orang). Salah satu penyebabnya adalah faktor preferensi, di mana masih banyak lulusan baru yang terlalu memilih-milih pekerjaan. Masih banyak lulusan sarjana yang belum termotivasi untuk berkarya atau melakukan pekerjaan diluar kompetensi formal yang dimiliki.

Selain faktor tersebut diatas, faktor lain yang berperan dalam masalah pengangguran, yaitu tidak sesuainya kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja dengan kebutuhan kualifikasi di dunia kerja. Kualifikasi yang dimaksud tidak sesuai dengan ketersediaan kompetensi yang tersedia, sebagai contoh adalah seorang sarjana namun dengan kompetensi rendah, sehingga pada saat masuk di dunia industri, mendapatkan pekerjaan dengan level yang tidak sesuai.

Dengan tantangan tersebut diatas, DPM, PTSP dan Naker Kabupaten Tuban telah melakukan upaya dengan sasaran peningkatan kompetensi calon tenaga kerja, penyebarluasan informasi bursa kerja, peningkatan peluang/kesempatan kerja, yaitu dengan melaksanakan berbagai program di Tahun 2019 yaitu : Program Peningkatan

Kesempatan Kerja, Program Transmigrasi Regional, dan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

A. Kinerja Pelayanan OPD

Penanaman Modal

Kinerja penanaman modal dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi domestik dan eksternal. Perekonomian Indonesia keseluruhan periode 2014-2015 tumbuh cukup tinggi namun dengan kecenderungan melambat sejak triwulan II/2016. Hal ini berpengaruh pula terhadap kinerja penanaman modal di Kabupaten Tuban. Berikut merupakan kinerja penanaman modal pada Tahun 2019 :

Tabel 1.1
Kinerja Penanaman Modal
Tahun 2019

No	Penanaman Modal	Capaian Tahun 2014	Capaian Tahun 2015	Capaian Tahun 2016	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019
1	2	4	5	6	7	8	9
a.	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	21	8	34	34	245	614
b.	Jumlah investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (milyar)	20.993	86.889	1.194	214.193	4.171	27.700

Sumber : DPM, PTSP dan TK Kab. Tuban, 2019

Terlihat dalam tabel di atas bahwa di Tahun 2019 jumlah investasi PMA/PMDN mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan dampak terbitnya Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal. Regulasi yang dimaksud mencabut Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal,

sehingga Izin Prinsip Penanaman Modal dihapus. Target yang ditetapkan dalam Renstra didasarkan pada pelaku usaha yang didaftarkan melalui Izin Prinsip Penanaman Modal (sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 1 Tahun 2014), dengan penghapusan Izin Prinsip Penanaman Modal pelaku usaha dapat langsung mendaftar melalui Online Single Submission, dan jumlahnya cukup banyak, Namun Bidang Penanaman Modal DPM, PTSP dan Naker Kab. Tuban tetap mengidentifikasi jumlah investor yang mendaftar dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk menghitung jumlah indikator kinerja.

Pelayanan Perizinan

Standar pelayanan publik adalah pedoman yang dipakai oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. Adapun standar pelayanan publik meliputi sebagai berikut :

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
5. Biaya/tarif
6. Produk Pelayanan
7. Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas
8. Kompetensi Pelaksana
9. Pengawasan Internal
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
11. Jumlah Pelaksana

12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pekerja
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Tahun 2015. Kemudian tahun 2017, standar pelayanan telah menggunakan ISO yang terbaru yaitu Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan dunia usaha. Adapun manfaat penerapan ISO 9001:2015 adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pedoman kerja yang berstandar, sehingga lebih efektif dan efisien
- b. Senantiasa melakukan inovasi dan perubahan yang lebih baik
- c. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan
- d. Meningkatkan citra organisasi serta meningkatkan investasi daerah

Berikut merupakan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Tahun 2019 :

Tabel 1.2.
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2019

No	Kinerja Pelayanan Perizinan	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019
1	2	3	4	5
a.	Nilai IKM	75,03 (B)	86,51 (B)	81,72 (B)

Sumber : DPM, PTSP dan TK Kab. Tuban, 2019

Nilai IKM Tahun 2019 tersebut mendapat predikat Baik (B) dengan nilai 86,51 yang berarti dalam pelaksanaan pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban cukup memuaskan. Namun jika dibandingkan dengan capaian nilai IKM dari Tahun 2018, maka terlihat cukup menurun. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor berdasarkan hasil penilaian nilai IKM Perizinan oleh pihak Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019. Terdapat 3 hal yang perlu dijadikan perhatian yaitu nilai indikator untuk Waktu Penyelesaian dengan nilai 78,13, dimana hal tersebut perlu adanya peningkatan percepatan penyelesaian perizinan. Untuk faktor yang kedua yaitu Perilaku Pelaksana dengan nilai 79,52 yang dapat diartikan bahwa petugas yang bersangkutan dalam melayani pengurusan perizinan kurang optimal, kurang dalam keramahan yang mungkin kurang memuaskan masyarakat. Dan faktor yang ketiga adalah Penyampaian Pengaduan, Sarana dan Pengaduan masih dengan nilai 79,54. Untuk mencapai nilai 8 maka dalam penampungan pengaduan, saran dan masukan perlu ditingkatkan. Poin –poin yang dapat membantu yaitu lebih menampung pengaduan masyarakat kemudian memberikan solusi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dari ketiga faktor diatas maka dalam intinya adalah lebih memperhatikan kenyamanan dan kepuasan masyarakat dalam mengurus perizinan.

Berdasarkan lama waktu proses perizinan, berikut ketentuan umum proses pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Tahun 2019 yang telah disesuaikan dengan sistem OSS :

Tabel 1.3
Jenis dan Waktu Proses Perizinan
Tahun 2019

No.	Jenis Izin	Waktu Proses (hari)
1	2	3
1	Izin Usaha Industri	1 Jam
2	Izin Usaha Perdagangan	1 Jam
3	Tanda Daftar Gudang	1 Jam
4	Tanda Daftar Perusahaan	3 Hari
5	Tanda Daftar Perusahaan PKL	3 Hari
6	Izin Pemasangan Reklame Komersial	3 Hari
7	Izin Pemasangan Reklame Non Komersial	3 Hari
8	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	3 Hari
9	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	3 Hari
10	Rekomendasi IUTM	3 Hari
11	Izin Daya Tarik Wisata	3 Hari
12	Izin Kawasan Pariwisata	3 Hari
13	Izin Jasa Transportasi Wisata	3 Hari
14	Izin Jasa Perjalanan Wisata	3 Hari
15	Izin Jasa Makanan dan Minuman	3 Hari
16	Izin Penyediaan Akomodasi	3 Hari
17	Izin Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	3 Hari
18	Izin Jasa Informasi Pariwisata	3 Hari
19	Izin Jasa Konsultasi Pariwisata	3 Hari
20	Izin Jasa Pramuwisata	3 Hari
21	Izin Wisata Tirta	3 Hari
22	Izin Panti Pijat (SPA)	3 Hari
23	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi (Izin Pusat Kebugaran dan Izin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga)	3 Hari
24	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	1 Jam
25	Izin Penyelenggaraan Klinik	3 Hari
26	Izin Rumah Sakit	3 Hari
27	Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika	3 Hari
28	Izin Laboratorium Klinik Pratama	3 Hari
29	Izin Optikal	3 Hari
30	Izin Apotek	3 Hari
31	Izin Toko Obat	3 Hari
32	Laik Sehat Hotel	3 Hari
33	Laik Sehat Kolam Renang	3 Hari
34	Laik Sehat Pemandian Umum	3 Hari
35	Laik Sehat Rumah Makan dan Restoran	3 Hari
36	Laik Sehat Jasa Boga / Catering	3 Hari

37	Izin Praktek Dokter / Bidan / Mantri Kesehatan	3 Hari
38	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Apotek	3 Hari
39	Izin Operasional Menara Telekomunikasi	3 Hari
40	Rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi	3 Hari
41	Izin Usaha Pembudidayaan Ikan	3 Hari
42	Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Besar	3 Hari
43	Izin Jagal / Pengedar Daging (SLJ)	3 Hari
44	Izin Prinsip Penanaman Modal	3 Hari
45	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3 Hari
46	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	3 Hari
47	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	3 Hari
48	Persetujuan Site Plan	3 Hari
49	Izin Pemanfaatan Tanah	3 Hari
50	Izin Lokasi	3 Hari
51	Surat Keterangan Tata Ruang	3 Hari
52	Izin Lingkungan	3 Hari
53	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	3 Hari
54	Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Kabupaten	3 Hari
55	Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)	3 Hari
56	Izin Trayek Angkutan Pedesaan / Angkutan Kota	3 Hari
57	Izin Usaha Angkutan Barang dan Orang	3 Hari
58	Rekomendasi Andalalin	3 Hari
59	Izin Survei / Riset / PKL / KKN	3 Hari
60	Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus	1 Hari
61	Izin Pendirian / Perpanjangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1 Hari

Sumber : DPM, PTSP dan TK Kab. Tuban, 2019

Tabel 1.4
Rata-Rata Lama Proses Perizinan

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Capaian
1	2	3	4	5
a.	Rata-rata lama proses perizinan	Hari	2017	4,3
		Hari	2018	4,3
		Hari	2019	3

Sumber : DPM, PTSP dan TK Kab. Tuban, 2019

Tabel 1.5
Jumlah Izin yang Diterbitkan

NO.	URAIAN INDIKATOR KINERJA	REALISASI			
		TAHUN 2017	Tahun 2018	Tahun 2018 Setelah OSS	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6
1	Izin Usaha Industri	16	17	53	104
2	Izin Usaha Perdagangan	1072	735	1158	1247
3	Tanda Daftar Gudang	6	3	17	6
4	Tanda Daftar Perusahaan	1092	699	1308	1532
5	Tanda Daftar Perusahaan PKL	-	-	164	112
6	Izin Pemasangan Reklame Komersial	334	436	-	366
7	Izin Pemasangan Reklame Non Komersial	12	16	-	7
8	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	-	-	-	-
9	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	-	-	-	-
10	Rekomendasi IUTM	-	-	-	-
11	Izin Daya Tarik Wisata	-	-	-	-
12	Izin Kawasan Pariwisata	-	-	-	-
13	Izin Jasa Transportasi Wisata	-	-	-	-
14	Izin Jasa Perjalanan Wisata	3	9	-	-
15	Izin Jasa Makanan dan Minuman	15	6	-	-
16	Izin Penyediaan Akomodasi	-	5	-	-
17	Izin Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	-	-	-	-

18	Izin Jasa Informasi Pariwisata	-	-	-	-
19	Izin Jasa Konsultasi Pariwisata	-	-	-	-
20	Izin Jasa Pramuwisata	-	-	-	-
21	Izin Wisata Tirta	5	1	-	-
22	Izin Panti Pijat (SPA)	-	-	-	-
23	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi (Izin Pusat Kebugaran dan Izin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga)	-	5	-	-
	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	122	147	216	361
25	Izin Penyelenggaraan Klinik	2	8	-	4
26	Izin Rumah Sakit	-	1	-	2
27	Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika	2	2	-	2
28	Izin Laboratorium Klinik Pratama	2	2	-	-
29	Izin Optikal	-	2	-	4
30	Izin Apotek	-	16	-	19
31	Izin Toko Obat	-	-	-	-
32	Laik Sehat Hotel	-	-	-	-
33	Laik Sehat Kolam Renang	-	-	-	-
34	Laik Sehat Pemandian Umum	-	-	-	-
35	Laik Sehat Rumah Makan dan Restoran	-	-	-	-
36	Laik Sehat Jasa Boga / Catering	-	-	-	-
37	Izin Praktek Dokter / Bidan / Mantri Kesehatan	-	-	-	-
38	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Apotek	-	-	-	-
39	Izin Operasional Menara Telekomunikasi	-	-	-	-
40	Rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi	-	15	-	-
41	Izin Usaha Pembudidayaan Ikan	-	7	100	-
42	Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Besar	-	4	-	-
43	Izin Jagal / Pengedar Daging (SLJ)	-	16	-	-
44	Izin Prinsip Penanaman Modal	-	-	-	-
45	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	-	-	-	-

46	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	-	-	-	-
47	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	477	-	610
48	Persetujuan Site Plan	-	25	-	21
49	Izin Pemanfaatan Tanah	-	1	-	5
50	Izin Lokasi	-	3	-	1
51	Surat Keterangan Tata Ruang	-	121	-	191
52	Izin Lingkungan	-	-	-	-
53	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	-	-	-	-
54	Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Kabupaten	-	-	-	-
55	Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)	-	-	-	-
56	Izin Trayek Angkutan Pedesaan / Angkutan Kota	-	-	-	1
57	Izin Usaha Angkutan Barang dan Orang	-	-	-	-
58	Rekomendasi Andalalin	-	-	-	2
59	Izin Survei / Riset / PKL / KKN	-	-	-	183
60	Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus	16	-	-	2
61	Izin Pendirian / Perpanjangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	-	9
62	Kartu Pencari Kerja (AK 1)	6573	1988	-	1078
63	Izin Operasional Unit Penyuluhan, Pendataan dan Pendaftaran Calon TKI (UP3CTKI)	-	-	-	6
64	Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	-	-	-	-
65	Rekomendasi Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja / Buruh (PPJP / B)	-	-	-	-
	JUMLAH	9.416	4.900	3.016	5.875

Sumber : DPM, PTSP dan TK Kab. Tuban, 2019

Ketenagakerjaan

Masalah utama Bidang Ketenagakerjaan sampai saat ini adalah semakin bertambahnya jumlah angkatan kerja pada setiap tahun yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja (lowongan kerja) yang ada, hal ini jelas akan menambah jumlah pengangguran pada setiap tahunnya.

Masalah lain yang masih dihadapi adalah rendahnya produktivitas kerja, rendahnya tingkat pengupahan, masih terjadinya perselisihan hubungan kerja/industrial, terbatasnya informasi pasar kerja yang tersedia baik keluar negeri maupun untuk pasar kerja yang ada di dalam negeri.

Agar tenaga kerja yang ada mampu bersaing sesuai dengan tuntutan keahlian atau skill yang dibutuhkan, maka diperlukan peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga memiliki kompetensi yang tinggi untuk meraih kesempatan kerja yang ada, baik di tingkat lokal, antar wilayah, nasional maupun kesempatan kerja di luar negeri.

Adapun gambaran keadaan Ketenagakerjaan di Kabupaten Tuban dari tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.6
Data Tenaga Kerja Tahun 2014 – 2019

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (orang)	889.362	897.601	897.601	937.985	918.724	
2.	Angkatan Kerja (orang)	569.185	603.039	603.039	653.981	659.499	
3.	Kesempatan Kerja (orang)	548.541	584.743	584.743	631.783	640.855	
4.	Pengangguran (orang)	20.644	18.296	19.396	22.198	18.644	
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64,00	67,18	67,18	71,71	71,78	68,62
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,63	3,03	3,03	3,39	2,83	2,76
7.	Pencari Kerja (AK 1) (orang)	8.720	4.970	5.151	6.573	5.091	1.078
8.	Penempatan Tenaga Kerja (orang)	3.866	3.578	3.879	5.021	3.926	776

Sumber : DPM, PTSP dan TK Kab. Tuban, 2019 dan BPS Kab. Tuban 2019

Tabel 1.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Ketenagakerjaan
Tahun 2014 – 2019

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Capaian	+ / (-)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi.	%	2014	55	69	14	-
		%	2015	65	75,72	10,72	-
		%	2016	65	88,91	23,91	-
		%	2017	75,72	100	24,28	-
		%	2018	75,72	75,24	(0,48)	-
		%	2019	75,72	100	24,28	-
2.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan.	%	2014	45	57	12	-
		%	2015	50	64,80	14,8	-
		%	2016	50	88,80	38,8	-
		%	2017	64,80	86,75	21,95	-
		%	2018	64,80	65,04	0,24	-
		%	2019	64,80	100	35,2	-
3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan.	%	2014	60	44,33	(15,67)	-
		%	2015	65	71,99	6,99	-
		%	2016	65	81,39	16,39	-
		%	2017	71,99	76,39	4,4	-
		%	2018	71,99	77,12	5,13	-
		%	2019	71,99	71,98	(0,01)	-
4.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama.	%	2014	90	100	10	-
		%	2015	93	100	7	-
		%	2016	93	100	7	-
		%	2017	100	73	(27)	-
		Kasus	2018	5	4	(1)	-
		Kasus	2019	6	10	4	-

Sumber : DPM, PTSP dan TK Kab. Tuban, 2019

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN APBD TAHUN 2019

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TUBAN

Penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban

No	Sasaran	IKU	Formulasi	Satuan	Target Tahun 2019
1	2	3	4		5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Nilai	79 (B)
2	Meningkatnya minat investor	Jumlah Investasi Berskala Nasional	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)	Milyar Rupiah	9.648
		Jumlah Investor Berskala Nasional	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	Investor	40
3	Meningkatnya kesempatan kerja, kapasitas dan perlindungan tenaga kerja dan transmigran	Persentase cakupan pencari kerja yang terdaftar dapat ditempatkan (%)	Jumlah pencari kerja terdaftar telah ditempatkan/ jumlah seluruh pencari kerja terdaftar x 100%	Persen	80%
		Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	Jumlah kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama/jumlah seluruh kasus ketenagakerjaan x 100%	Persen	100%

Sumber : DPM,PTSP dan TK Kabupaten Tuban, 2019

Tabel 2.2.
Program dan Kegiatan Tahun 2019
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban

Kode	Program / Kegiatan
2.12.2.12.01.33	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran
2.12.2.12.01.33.01	Penyediaan jasa perkantoran
2.12.2.12.01.33.02	Penyediaan peralatan perkantoran
2.12.2.12.01.33.03	Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perkantoran
2.12.2.12.01.33.04	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
2.12.2.12.01.33.13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.12.2.12.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.12.2.12.01.01.05.08	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.12.2.12.01.01.05.06	Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur
2.12.2.12.01.01.11	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2.12.2.12.01.01.11.01	Koordinasi dan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja perangkat daerah
2.12.2.12.01.01.11.08	Fasilitas kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah
2.12.2.12.01.34	Program Promosi dan Kerjasama Investasi
2.12.2.12.01.34.08	Promosi Potensi Investasi
2.12.2.12.01.34.02	Fasilitasi, koordinasi dan kerjasama di bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
2.12.2.12.01.34.09	Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2.01.2.12.01.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja

2.01.2.12.01.01.16.08	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
2.01.2.12.01.01.16.18	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Las Listrik bagi Pencari Kerja (DBHCHT)
2.01.2.12.01.01.16.10	Penyiapan Sumber Daya Tenaga Kerja
2.01.2.12.01.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan
2.01.2.12.01.01.17.16	Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan
2.01.2.12.01.01.17.12	Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial
2.01.2.12.01.01.17.17	Perbaikan Syarat Kerja
2.01.2.12.01.18	Program Transmigrasi Regional
2.01.2.12.01.18.04	Pelayanan Transmigrasi Regional
4.08.2.12.01.31	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan
4.08.2.12.01.31.01	Penyebarluasan Informasi Perizinan
4.08.2.12.01.31.02	Pengendalian dan Evaluasi Perizinan
4.08.2.12.01.31.05	Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu

Sumber : DPM,PTSP dan TK Tahun 2019

BAB III

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN 2019

1. Realisasi Program dan Kegiatan APBD Tahun 2019 beserta hasil yang dicapai sesuai bidang tugas masing – masing.

Pada tahun 2019 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Modal dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban melaksanakan sebanyak 8 (delapan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) kegiatan dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker Kab. Tuban per Urusan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Urusan Perizinan	463.821.000	422.012.913	90,99
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	463.821.000	422.012.913	90,99
Penyebarluasan Informasi Perizinan	171.145.000	155.506.214	90,86
Pengendalian dan Evaluasi Perizinan	205.750.000	190.067.583	92,38
Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu	86.926.000	76.439.116	87,94
Urusan Penanaman Modal	272.430.000	263.991.079	96,90
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	272.430.000	263.991.079	96,90
Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	61.420.000	60.275.976	98,14
Promosi Potensi	181.562.000	176.003.952	96,94

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Investasi			
Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	29.448.000	27.711.151	94,10
Urusan Ketenagakerjaan	1.686.274.500	1.569.842.886	93,09
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.109.026.500	1.053.492.082	94,99
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga kerja	183.051.500	169.999.846	92,87
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Las Listrik bagi Pencari Kerja (DBHCHT)	416.377.000	411.854.600	98,91
Penyiapan Sumber Daya Tenaga Kerja	509.598.000	471.637.636	92,55
Program Transmigrasi Regional	108.680.000	97.477.400	89,69
Pelayanan Transmigrasi Regional	108.680.000	97.477.400	89,69
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	468.568.000	418.873.404	89,39
Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan	138.179.000	119.823.076	86,72
Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial	170.055.500	152.273.540	89,54
Perbaikan Syarat Kerja	160.333.500	146.776.788	91,54
Urusan	1.391.326.292	1.280.448.000	92,03

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Kesekretariatan			
Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	1.087.550.000	989.154.696	90,95
Penyediaan Jasa Perkantoran	285.800.000	254.362.871	89,00
Penyediaan Peralatan Perkantoran	231.200.000	189.461.900	81,95
Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	298.000.000	288.369.619	96,77
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	59.000.000	50.820.000	86,14
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	213.550.000	206.140.306	96,53
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	165.936.292	155.774.054	93,88
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	38.100.000	35.700.000	93,70
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	127.836.292	120.074.054	93,93
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	137.840.000	135.519.250	98,32
Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	40.940.000	39.728.250	97,04
Fasilitasi Kinerja Pengelolaan	96.900.000	95.791.000	98,86

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Keuangan Perangkat Daerah			
JUMLAH	3.813.851.792	3.536.294.878	92,72

Sumber : DPM,PTSP dan TK Tahun 2019

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1. Urusan Perizinan

Urusan Perizinan mempunyai peran strategis sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam menunjang perkembangan usaha. Guna meningkatkan iklim investasi yang kondusif dalam pembangunan di Kabupaten Tuban diarahkan melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan.

Dalam Urusan Perizinan di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Dengan anggaran sebesar Rp. 463.821.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 422.012.913,- atau 90,99%. Dengan indikator kinerja yaitu :

1. Persentase ketepatan waktu dalam menyelesaikan izin yang terbit sesuai SOP dengan target 100%, dan terealisasi sebesar 100%.
2. Persentase tindak lanjut terhadap hasil pengendalian izin usaha dengan target 70%, terealisasi sebesar 70%.
3. Peningkatan jumlah pemohon izin dengan target 4.000 pemohon izin, terealisasi sebanyak 4.425 pemohon izin.

2. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal mempunyai peran strategis sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui daya tarik investasi dan penyiapan tenaga kerja yang bersaing serta penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tuban. Urusan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan dan melaksanakan koordinasi, menyusun program dan petunjuk teknis, serta

pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Penanaman Modal.

Dalam Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Dengan anggaran sebesar Rp. 272.430.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 263.991.079,- atau 96,90%. Dengan indikator kinerja yaitu :

1. Jumlah investor yang mendaftar penanaman modal di daerah (PMDN) dengan target sebanyak 8 investor, terealisasi sebanyak 614 investor. Melonjaknya realisasi jumlah investor di Tahun 2019 yaitu sebanyak 614 investor disebabkan dampak terbitnya Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal. Regulasi yang dimaksud mencabut Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, sehingga Izin Prinsip Penanaman Modal dihapus. Target yang ditetapkan dalam Renstra didasarkan pada pelaku usaha yang didaftarkan melalui Izin Prinsip Penanaman Modal (sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 1 Tahun 2014), dengan penghapusan Izin Prinsip Penanaman Modal pelaku usaha dapat langsung mendaftar melalui Online Single Submission, dan jumlahnya cukup banyak, Namun Bidang Penanaman Modal DPM, PTSP dan Naker Kab. Tuban tetap mengidentifikasi jumlah investor yang mendaftar dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk menghitung jumlah indikator kinerja.

3. Urusan Ketenagakerjaan

Urusan Ketenagakerjaan mempunyai peran strategis sebagai koordinator dan fasilitator bidang ketenagakerjaan guna meningkatkan kualitas SDM (pencari kerja, tenaga kerja, hubungan industrial, serta penerapan K3 di perusahaan) dalam pembangunan di Kabupaten Tuban diarahkan melalui peningkatan keterampilan (skill), pengetahuan peraturan ketenagakerjaan bagi perusahaan dan tenaga kerja.

Dalam Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Dengan anggaran sebesar Rp. 1.686.274.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.569.842.886,- atau 93,09%. Dengan indikator kinerja yaitu :

1. Prosentase besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan dengan target sebesar 71,99%, terealisasi sebesar 71,98%. Tercapainya realisasi kinerja kurang dari target didapatkan dari data jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan data jumlah pencari kerja.
2. Presentase besaran tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 75,72%, terealisasi sebesar 100%.
3. Presentase besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan dengan target sebesar 64,80%, terealisasi sebesar 100%.
4. Cakupan transmigrasi yang dapat ditempatkan dengan target sebesar 35%, terealisasi sebesar 60%.
5. Prosentase potensi perselisihan Hubungan Industrial yang ditindaklanjuti/diselesaikan dengan target 75%, terealisasi sebesar 100%.
6. Besaran peraturan perusahaan (PP) yang disahkan dengan target sebanyak 5 PP, terealisasi sebanyak 5 PP.
7. Besaran perjanjian kerja bersama (PKB) yang didaftarkan dengan target 3 PKB, terealisasi sebanyak 3 PKB.

8. Besaran perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dicatatkan dengan target 560 peserta, terealisasi sebanyak 1.392 peserta.
9. Besaran LKS Bipartit yang dicatatkan dengan target sebanyak 6 perusahaan, terealisasi sebanyak 2 perusahaan, hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran dari perusahaan akan pentingnya LKS Bipartit.
10. Besaran penerapan Minimum Kabupaten (UMK) dengan target 65%, terealisasi sebesar 67%.

4. Urusan Kesekretariatan

Urusan Kesekretariatan mempunyai peran strategis sebagai pendukung teknis dan administrasi dalam pelaksanaan tugas program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban. Guna meningkatkan peran tersebut, maka keberhasilan Urusan Kesekretariatan dapat diukur melalui kesejahteraan pegawai, kelancaran proses pendanaan, serta terlaksananya laporan-laporan dokumen kinerja.

Dalam Urusan Kesekretariatan di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Dengan anggaran sebesar Rp. 1.391.326.292,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.280.448.000,- atau 92,03%. Dengan indikator kinerja yaitu :

1. Angka indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dengan target 80%, terealisasi sebesar 80%.
2. Prosentase aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan dengan target 80%, terealisasi sebesar 80%.
3. Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja dengan target BB, terealisasi dengan nilai BB.

Adapun rincian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyebarluasan Informasi Perizinan
 - b. Pengendalian dan Evaluasi Perizinan
 - c. Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
 - b. Promosi Potensi Investasi
 - c. Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
 - b. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Las Listrik bagi Pencari Kerja (DBHCHT)
 - c. Penyiapan Sumber Daya Tenaga Kerja
4. Program Transmigrasi Regional dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Transmigrasi Regional
5. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - a. Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan
 - b. Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial
 - c. Perbaikan Syarat Kerja
6. Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Perkantoran
 - b. Penyediaan Peralatan Perkantoran
 - c. Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 - e. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - b. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
8. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- a. Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang direalisasikan pada Urusan Perizinan, Urusan Penanaman Modal, Urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Kesekretariatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban pada Tahun 2019 didukung alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 4.1
Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal, PTSP dan
Naker Kab. Tuban per Urusan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Urusan Perizinan	463.821.000	422.012.913	90,99
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	463.821.000	422.012.913	90,99
Penyebarluasan Informasi Perizinan	171.145.000	155.506.214	90,86
Pengendalian dan Evaluasi Perizinan	205.750.000	190.067.583	92,38
Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu	86.926.000	76.439.116	87,94
Urusan Penanaman Modal	272.430.000	263.991.079	96,90
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	272.430.000	263.991.079	96,90
Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	61.420.000	60.275.976	98,14
Promosi Potensi Investasi	181.562.000	176.003.952	96,94
Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	29.448.000	27.711.151	94,10
Urusan Ketenagakerjaan	1.686.274.500	1.569.842.886	93,09
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.109.026.500	1.053.492.082	94,99
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga kerja	183.051.500	169.999.846	92,87
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan	416.377.000	411.854.600	98,91

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Las Listrik bagi Pencari Kerja (DBHCHT)			
Penyiapan Sumber Daya Tenaga Kerja	509.598.000	471.637.636	92,55
Program Transmigrasi Regional	108.680.000	97.477.400	89,69
Pelayanan Transmigrasi Regional	108.680.000	97.477.400	89,69
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	468.568.000	418.873.404	89,39
Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan	138.179.000	119.823.076	86,72
Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial	170.055.500	152.273.540	89,54
Perbaikan Syarat Kerja	160.333.500	146.776.788	91,54
Urusan Kesekretariatan	1.391.326.292	1.280.448.000	92,03
Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	1.087.550.000	989.154.696	90,95
Penyediaan Jasa Perkantoran	285.800.000	254.362.871	89,00
Penyediaan Peralatan Perkantoran	231.200.000	189.461.900	81,95
Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	298.000.000	288.369.619	96,77
Pengadaan Sarana	59.000.000	50.820.000	86,14

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
dan Prasarana Perkantoran			
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	213.550.000	206.140.306	96,53
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	165.936.292	155.774.054	93,88
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	38.100.000	35.700.000	93,70
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	127.836.292	120.074.054	93,93
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	137.840.000	135.519.250	98,32
Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	40.940.000	39.728.250	97,04
Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	96.900.000	95.791.000	98,86
JUMLAH	3.813.851.792	3.536.294.878	92,72

Sumber : DPM, PTSP, Naker Kabupaten Tuban Tahun 2019

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Urusan Perizinan, Urusan Penanaman Modal, Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Kesekretariatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban melalui 8 (delapan) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.813.851.792,- dan terealisasi sebesar 3.536.294.878,- atau 92,72%.

Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan** dengan anggaran Rp. 463.821.000,- terealisasi Rp. 422.012.913,- atau 90,99% dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyebarluasan Informasi Perizinan dengan anggaran Rp. 171.145.000,- terealisasi Rp. 155.506.214,- atau 90,86% dengan indikator kinerja :
 - 1) Jumlah sosialisasi tatap muka dengan target sebanyak 10 kecamatan, terealisasi sebanyak 10 kecamatan.
 - 2) Jumlah booklet/leaflet dengan target sebanyak 1.000 booklet/leaflet, terealisasi sebanyak 1.000 booklet/leaflet.
 - 3) Jumlah siaran radio dengan target sebanyak 7 kali, terealisasi sebanyak 7 kali.
 - 4) Jumlah pemasangan billboard reklame dengan target sebanyak 1 unit billboard, terealisasi sebanyak 1 unit billboard.
 - b) Pengendalian dan Evaluasi Perizinan dengan anggaran Rp. 205.750.000,- terealisasi Rp. 190.067.583,- atau 92,38% dengan indikator kinerja :
 - 1) Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pemantauan dan pengendalian dengan target sebanyak 450 pelaku usaha, terealisasi sebanyak 395 pelaku usaha dimana hal ini dikarenakan lokasi usaha yang terdapat di Online Single Submission (OSS) sebagian besar tidak sesuai,

sehingga petugas di lapangan tidak menemukan lokasi usaha tersebut.

2) Jumlah pendampingan konsultan audit ISO 2015 dan jumlah dokumen hasil audit dengan target sebanyak 1 pendampingan dan 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 pendampingan dan 1 dokumen.

c) Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan anggaran Rp. 86.926.000,- terealisasi Rp. 76.439.116,- atau 87,94% dengan indikator kinerja :

1) Persentase permohonan izin yang masuk yang tertangani (perlu persetujuan tim teknis) dengan target kinerja 100%, terealisasi sebesar 100%.

2) Jumlah kedatangan di tiap kecamatan perizinan keliling dengan target sebanyak 80 kali, terealisasi sebanyak 83 kali.

1. **Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi** dengan anggaran Rp. 272.430.000,- terealisasi Rp. 263.991.079,- atau 96,90% dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha dengan anggaran Rp. 61.420.000,- terealisasi Rp. 60.275.976,- atau 98,14% dengan indikator kinerja :

1) Jumlah koordinasi dan kerjasama yang dilaksanakan dengan target kinerja sebanyak 32 kali, terealisasi sebanyak 33 kali.

b) Promosi Potensi Investasi dengan anggaran Rp. 181.562.000,- terealisasi Rp. 176.003.952,- atau 96,94% dengan indikator kinerja :

1) Terlaksananya pameran promosi investasi dengan target sebanyak 3 kali, terealisasi sebanyak 5 kali.

- 2) Investor yang berminat untuk berinvestasi di Kabupaten Tuban dengan target sebanyak 31% dari total pengunjung, terealisasi sebanyak 30%.
- c) Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan anggaran Rp. 29.448.000,- terealisasi Rp. 27.711.151,- atau 94,10% dengan indikator kinerja :
 - 1) Jumlah pendaftaran penanaman modal yang terealisasi menjadi izin usaha dengan target sebesar 72%, terealisasi sebesar 33,06% dikarenakan dari total jumlah pendaftar melalui Online Single Submission (OSS) sebanyak 614, hanya sebanyak 203 pelaku usaha dengan izin yang efektif yaitu dengan prosentase 33,06%.
3. **Program Peningkatan Kesempatan Kerja** dengan anggaran Rp. 1.109.026.500,- terealisasi Rp. 1.053.492.082,- atau 94,99% dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga kerja dengan anggaran Rp. 183.051.500,- terealisasi Rp. 169.999.846,- atau 92,87% dengan indikator kinerja :
 - 1) Jumlah kecamatan sasaran dengan target sebanyak 6 kecamatan, terealisasi sebanyak 6 kecamatan.
 - 2) Jumlah pengunjung dan pencari kerja dengan target sebanyak 2.400 orang, terealisasi sebanyak 2.506 orang.
 - b) Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Las Listrik bagi Pencari Kerja (DBHCHT) dengan anggaran Rp. 416.377.000,- terealisasi Rp. 411.854.600,- atau 98,91% dengan indikator kinerja :

- 1) Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan target sebanyak 60 peserta, terealisasi sebanyak 60 peserta.
 - 2) Prosentase tenaga kerja yang lulus/memiliki keahlian sebesar 80%, terealisasi sebesar 100%.
- c) Penyiapan Sumber Daya Tenaga Kerja dengan anggaran Rp. 509.598.000,- terealisasi Rp. 471.637.636,- atau 92,55% dengan indikator kinerja :
- 1) Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan sebanyak 220 peserta, terealisasi sebanyak 220 peserta.
 - 2) Jumlah pemberian hibah pelatihan menjahit dengan target sebanyak 100 orang, terealisasi sebanyak 100 orang.

4. **Program Transmigrasi Regional** dengan anggaran Rp. 108.680.000,- terealisasi Rp. 97.477.400,- atau 89,69% dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pelayanan Transmigrasi Regional dengan anggaran Rp. 108.680.000,- terealisasi Rp. 97.477.400,- atau 89,69% dengan indikator kinerja :
 - 1) Jumlah peserta penyuluhan transmigrasi dengan target 200 peserta, terealisasi sebanyak 200 peserta.
 - 2) Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan calon transmigrasi dengan target sebanyak 5 KK, terealisasi sebanyak 3 KK, dikarenakan penentuan jumlah keluarga yang diberangkatkan mengikuti Program Transmigrasi yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
 - 3) Jumlah transmigran yang diberangkatkan dengan target sebanyak 5 KK, terealisasi sebanyak 3 KK, dikarenakan penentuan jumlah keluarga yang diberangkatkan mengikuti Program Transmigrasi yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

5. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan dengan anggaran Rp. 468.568.000,- terealisasi Rp. 418.873.404,- atau 89,39% dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan dengan anggaran Rp. 138.179.000,- terealisasi Rp. 119.823.076,- atau 86,72% dengan indikator kinerja :

1) Jumlah peserta pembinaan LKS Bipartit dengan target sebanyak 50 orang dari 25 perusahaan (25 orang manajemen dan 25 orang perwakilan pekerja/SP/SB), terealisasi sebanyak 45 orang dari 25 perusahaan (25 orang manajemen dan 25 orang perwakilan pekerja/SP/SB), hal ini dikarenakan ketidakhadiran 5 peserta undangan.

2) Jumlah peserta pembinaan serikat pekerja/serikat buruh dengan target sebanyak 50 orang dari 25 serikat pekerja/serikat buruh (2 orang pengurus SP/SB), terealisasi sebanyak 44 orang dari 25 serikat pekerja/serikat buruh (2 orang pengurus SP/SB), hal ini dikarenakan ketidakhadiran 6 peserta undangan.

3) Jumlah koordinasi LKS Tripartit terkait isu-isu ketenagakerjaan dengan target sebanyak 4 kali, terealisasi sebanyak 4 kali.

b) Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial dengan anggaran Rp. 170.055.500,- terealisasi Rp. 152.273.540,- atau 89,54% dengan indikator kinerja :

1) Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dengan target 100 perusahaan, terealisasi sebanyak 100 perusahaan.

2) Jumlah peserta sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan dengan target sebanyak 50 perusahaan, terealisasi sebanyak 23 perusahaan, hal ini dikarenakan pada saat

pelaksanaan kegiatan banyak perusahaan yang diundang tidak hadir karena bertepatan waktu dengan kegiatan lain.

- 3) Dokumen laporan monitoring dan evaluasi dengan target sebanyak 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen.
 - 4) Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan K3 dengan target sebanyak 30 perusahaan, terealisasi sebanyak 29 perusahaan, hal ini dikarenakan 1 perusahaan yang dilakukan pembinaan belum memiliki P2K3 sehingga belum memenuhi syarat.
- c) Perbaikan Syarat Kerja dengan anggaran Rp. 160.333.500,- terealisasi Rp. 146.776.788,- atau 91,54% dengan indikator kinerja :
- 1) Usulan penetapan UMK dengan target 1 usulan, terealisasi sebanyak 1 usulan.
 - 2) Jumlah peserta sosialisasi UMK dengan target 50 perusahaan, terealisasi sebanyak 48 perusahaan, hal ini dikarenakan terdapat 2 perusahaan yang tidak hadir.
 - 3) Jumlah peserta bimbingan teknis struktur dan skala upah dengan target sebanyak 50 perusahaan, terealisasi sebanyak 31 perusahaan, hal ini dikarenakan terdapat 19 perusahaan yang tidak hadir.
 - 4) Jumlah peserta sosialisasi peningkatan kepesertaan BPJS sektor pekerja formal dan non formal dengan target 50 perusahaan, terealisasi sebanyak 39 perusahaan, hal ini dikarenakan terdapat 11 perusahaan yang tidak hadir.
 - 5) Jumlah peserta bimbingan teknis hubungan industrial ketenagakerjaan dengan target 50 perusahaan, terealisasi

sebanyak 47 perusahaan, hal ini dikarenakan terdapat 3 perusahaan yang tidak hadir.

6. **Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran** dengan anggaran Rp. 1.087.550.000,- terealisasi Rp. 989.154.696,- atau 90,95% kegiatan sebagai berikut :

a) Penyediaan Jasa Perkantoran dengan anggaran Rp. 285.800.000,- terealisasi Rp. 254.362.871,- atau 89,00% dengan indikator :

1) Jumlah jenis jasa administrasi perkantoran dengan target 11 jenis, terealisasi 11 jenis jasa.

b) Penyediaan Peralatan Perkantoran dengan anggaran Rp. 231.200.000,- terealisasi Rp. 189.461.900,- atau 81,95% dengan indikator :

1) Jumlah jenis peralatan perkantoran dengan target 5 jenis, terealisasi 5 jenis peralatan.

c) Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan anggaran Rp. 298.000.000,- terealisasi Rp. 288.369.619,- atau 96,77% dengan indikator kinerja :

1) Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran yang terpelihara dengan target 5 jenis, terealisasi 5 jenis.

d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan anggaran Rp. 59.000.000,- terealisasi Rp. 50.820.000,- atau 86,14% dengan indikator kinerja :

1) Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia sebanyak 5 jenis, terealisasi sebanyak 5 jenis.

e) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan anggaran Rp. 213.550.000,- terealisasi Rp. 206.140.306,- atau 96,53% dengan indikator kinerja :

- 1) Jumlah dokumen laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah yang diikuti dengan target 45 dokumen, terealisasi sebanyak 70 dokumen, hal ini dikarenakan banyaknya surat undangan untuk kegiatan rapat-rapat luar daerah hingga melebihi target kinerja.

7. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** dengan anggaran Rp. 165.936.292,- terealisasi Rp. 155.774.054,- atau 93,88% dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan anggaran Rp. 38.100.000,- terealisasi Rp. 35.700.000,- atau 93,70% dengan indikator kinerja :

- 1) Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan dengan target 6 stel PSH, 54 stel PDH pelayan, 54 stel pakaian olahraga, terealisasi sebanyak 6 stel PSH, 54 stel PDH pelayan, 54 stel pakaian olahraga.

- b) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur dengan anggaran Rp. 127.836.292,- terealisasi Rp. 120.074.054,- atau 93,93% dengan indikator kinerja :

- 1) Jumlah aparatur yang mengikuti kompetensi dengan target sebanyak seluruh pegawai, terealisasi sebanyak seluruh pegawai.

8. **Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah** dengan anggaran Rp. 137.840.000,- terealisasi Rp. 135.519.250,- atau 98,32% dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran

Rp. 40.940.000,- terealisasi Rp. 39.728.250,- atau 97,04% dengan indikator kinerja :

- 1) Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi dengan target sebanyak 6 dokumen, terealisasi 7 dokumen.
- b) Fasilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 96.900.000,- terealisasi Rp. 95.791.000,- atau 98,86% dengan indikator kinerja :
 - 2) Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dengan target 9 dokumen, terealisasi sebanyak 9 dokumen.
 - 3) Prosentase penyerapan anggaran OPD dengan target 95%, terealisasi sebesar 92,10%, hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran dan telah disesuaikan dengan kebutuhan OPD.

Capaian kinerja pada Tahun 2019 berdasarkan indikator sasaran, sebagai berikut :

Tabel 4.2
Target Kinerja Tahun 2018 dan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2019
Berdasarkan Program dan Kegiatan

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan	Presentase ketepatan waktu dalam menyelesaikan izin yang diterbitkan sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	Tercapai
		Presentase tindak lanjut terhadap hasil pengendalian izin usaha (%)	65%	70%	70%	70%	Tercapai
		Peningkatan jumlah pemohon izin	3.850 pemohon izin	4.900 pemohon izin	4.000 pemohon izin	4.425 pemohon izin	Tercapai
	Pelayanan perizinan keliling	Jumlah kedatangan di tiap kecamatan sasaran pelayanan perizinan keliling	140 kali	152 kali			
	Koordinasi pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu	Terselenggaranya rapat koordinasi pembahasan permohonan izin dan penanganan pengaduan izin	40 kali	40 kali			

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		oleh tim teknis					
		Presentase pemoho ijin yang masuk yang tertangani (Perlu persetujuan tim teknis)			100%	100%	Tercapai
		Jumlah kedatangan di tiap kecamatan perizinan keliling			80 kali	83 kali	Tercapai
	Pengembangan sistem informasi manajemen perizinan	Pembaruan aplikasi untuk 25 jenis perizinan	25 aplikasi	25 aplikasi			
	Sosialisasi dan penyebaran informasi pelayanan perizinan	Jumlah sosialisasi tatap muka, booklet/leaflet, siaran radio dan pemasangan billboard reklame	10 kcmt, 1000 booklet/leaflet, 7x siaran radio, 1 unit billboard reklame	10 kcmt, 1000 booklet/leaflet, 7x siaran radio, 1 unit billboard reklame			
	Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan perizinan	Jumlah pelaksanaan pemantauan dan pengendalian	80 kali	76 kali			
	Evaluasi penerapan implementasi penjamin Mutu melalui penerapan sistem manajemen	Jumlah pendampingan konsultan dan jumlah dokumen hasil audit tim ISO	1 pendampingan, 1 dokumen	1 pendampingan, 1 dokumen			

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mutu ISO 9001 Tahun 2008						
	Pengendalian dan evaluasi perizinan	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pemantauan dan pengendalian			450 pelaku usaha	395 pelaku usaha	Belum Tercapai
		Jumlah pendampingan konsultan audit ISO 2015 dan jumlah dokumen hasil audit			1 dokumen	1 dokumen	Tercapai
	Penyebarluasan informasi perizinan	Jumlah sosialisasi tatap muka			10 kecamatan	10 kecamatan	Tercapai
		Jumlah booklet/leaflet			1000 booklet/leaflet	1000 booklet/leaflet	Tercapai
		Jumlah siaran radio			7 kali	7 kali	Tercapai
		Jumlah pemasangan billboard reklame			1 unit	1 unit	Tercapai
2	Program promosi dan kerjasama investasi	Jumlah investor yang terjaring dalam pelaksanaan promosi dan kerjasama investasi	6 investor	16 investor			
	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Jumlah investor yang mendaftar penanaman modal di daerah (PMDN)			8 Investor	614 Investor	Tercapai

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah keikutsertaan pameran investasi	3 kali	3 kali			
	Promosi potensi investasi	Terlaksananya pameran promosi investasi			3 kali	5 kali	Tercapai
		Investor yang berminat untuk berinvestasi di Kabupaten Tuban			31% dari total pengunjung	30%	Belum Tercapai
	Fasilitasi koordinasi dan kerjasama di bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia usaha	Jumlah koordinasi dan kerjasama yang dilaksanakan	17 kali	31 kali	32 kali	33 kali	Tercapai
	Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi	1 dokumen	1 dokumen			
	Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pendaftaran penanaman modal yang terealisasi menjadi izin usaha			72%	33,06%	Belum Tercapai

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Program peningkatan kesempatan kerja	Prosentase besaran pencari kerja yang terdaftar dapat ditempatkan	71,99%	71,99%	71,99%	71,98%	Belum Tercapai
		Prosentase besaran pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	75,72%	75,72%	75,72%	100%	Tercapai
		Prosentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	64,80%	64,80%	64,80%	100%	Tercapai
	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti kegiatan penyebaran informasi bursa kerja	300 orang	300 orang			
		Jumlah kecamatan sasaran			6 kecamatan	6 kecamatan	Tercapai
		Jumlah pengunjung dan pencari kerja			2.400 orang	2.506 orang	Tercapai
	Pameran bursa kerja	Jumlah pengunjung dan pencari kerja	2400 orang	2400 orang			
	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah masyarakat yang dilatih	152 orang	152 orang			

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	melalui pelatihan las dan otomotif						
	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan ketrampilan las listrik bagi pencari kerja (DBHCHT)	Jumlah tenaga kerja yang dilatih			60 peserta	60 peserta	Tercapai
		Prosentase tenaga kerja yang lulus/memiliki keahlian			80%	100%	Tercapai
	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan (pelatihan berbasis kewirausahaan)	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	80 orang	80 orang			
	Penyiapan sumber daya tenaga kerja	Jumlah peserta yang mengikuti kewirausahaan			220 peserta	220 peserta	Tercapai
		Jumlah pemberian hibah pelatihan menjahit			100 orang	100 orang	Tercapai

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Monitoring, evaluasi dan ekspos pelatihan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi	1 dokumen	1 dokumen			
	Program pembinaan lingkungan sosial bidang ketenagakerjaan	Meningkatkan pembinaan lingkungan sosial bidang ketenagakerjaan	90%	100%			
	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan otomotif (DBHCHT)	Tersedianya tenaga kerja siap pakai	52 orang	52 orang			
4	Program transmigrasi regional	Prosentase besaran transmigran yang dapat ditempatkan	30%	11,76%			
		Cakupan transmigran yang dapat ditempatkan (%)			35%	60%	Tercapai
	Penyuluhan	Jumlah peserta yang mengikuti	300 orang	300 orang			

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	transmigrasi regional	penyuluhan transmigrasi					
	Pelatihan transmigrasi regional	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan calon transmigrasi regional (KK)	10 KK	10 KK			
	Pemberangkatan transmigrasi regional	Jumlah peserta yang mengikuti pemberangkatan transmigrasi regional (KK)	10 KK	2 KK			
	Pelayanan transmigrasi regional	Jumlah peserta penyuluhan transmigrasi			200 peserta	200 peserta	Tercapai
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan calon transmigran			5 KK	3 KK	Belum Tercapai
		Jumlah transmigran yang diberangkatkan (KK)			5 KK	3 KK	Belum Tercapai
5	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Besaran kasus yang terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	5 PB	4 PB	6 PB	11 PB	Tercapai
		Persentase potensi perselisihan hubungan industrial yang			75%	100%	Tercapai

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		ditindaklanjuti/diselesaikan					
		Besaran peraturan perusahaan (PP) yang disahkan	4 PP	5 PP	5 PP	5 PP	Tercapai
		Besaran perjanjian kerja bersama (PKB) yang didaftarkan	2 PKB	2 PKB	3 PKB	3 PKB	Tercapai
		Besaran perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dicatatkan	555 PKWT	1.790 PKB	560 PKWT	1.392 PKWT	Tercapai
		Besaran LKS Bipartit yang dicatatkan	5 LKS bipartit	2 LKS bipartit	6 LKS bipartit	2 LKS bipartit	Belum Tercapai
		Prosentase besaran pengupahan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	60%	60%	65%	65%	Tercapai
	Fasilitasi penetapan dan penerapan Upah Minimum Kabupaten	Tersusunnya usulan UMK tahun 2018 kabupaten tuban	1 usulan	1 usulan			
	Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Jumlah peserta sosialisasi UMK (perusahaan)	50 perusahaan	47 perusahaan			
	Bimbingan teknis	Jumlah peserta bimbingan	100 perusahaan	100 perusahaan			

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	struktur dan skala upah	teknis struktur dan skala upah (perusahaan)					
	Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial	Jumlah peserta sosialisasi dan jumlah kasus yang diselesaikan	100 perusahaan	100 perusahaan			
		Jumlah perusahaan yang terfasilitasi			100 perusahaan	68 perusahaan	Tercapai
		Jumlah peserta sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan			50 perusahaan	23 perusahaan	Belum Tercapai
		Dokumen laporan monitoring dan evaluasi			1 dokumen	1 dokumen	Tercapai
		Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)			30 perusahaan	29 perusahaan	Belum Tercapai
	Peningkatan kepesertaan BPJS sektor pekerja formal dan non	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kepesertaan BPJS sektor formal dan non formal (perusahaan)	100 orang/pelaku usaha	100 orang/pelaku usaha			

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	formal						
	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan (perusahaan)	50 perusahaan	50 perusahaan			
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi	1 dokumen	1 dokumen			
	Pengurangan pekerja anak dalam mendukung PKH	Jumlah pekerja anak yang mengikuti sosialisasi dan fasilitasi pengurangan pekerja anak dalam mendukung PKH	0	0			
	Bimbingan teknis hubungan industrial ketenagakerjaan	Jumlah peserta bimbingan teknis hubungan industrial ketenagakerjaan (perusahaan)	100 perusahaan	100 perusahaan			
	Pembentukan dan pemberdayaan lembaga-lembaga	Jumlah koordinasi LKS Tripartit terkait isu-isu ketenagakerjaan	2 LKS tripartit	2 LKS tripartit			

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	ketenagakerjaan						
		Jumlah peserta pembinaan LKS bipartit			50 orang dari 25 perusahaan (25 orang manajemen dan 25 orang perwakilan pekerja/SP/SB)	45 orang dari 25 perusahaan (25 orang manajemen dan 25 orang perwakilan pekerja/SP/SB)	Belum Tercapai
		Jumlah peserta pembinaan serikat pekerja/serikat buruh			50 orang dari 25 serikat pekerja/serikat buruh (2 orang pengurus SP/SB)	44 orang dari 25 serikat pekerja/serikat buruh (2 orang pengurus SP/SB)	Belum Tercapai
		Jumlah koordinasi LKS Tripartit terkait isu-isu ketenagakerjaan			4 kali	4 kali	Tercapai
	Perbaikan syarat kerja	Usulan penetapan UMK			1 usulan	1 usulan	Tercapai
		Jumlah peserta sosialisasi UMK			50 perusahaan	48 perusahaan	
		Jumlah peserta bimbingan teknis struktur dan skala upah			50 perusahaan	31 perusahaan	Belum Tercapai
		Jumlah peserta sosialisasi peningkatan kepesertaan BPJS sektor formal dan non formal			50 perusahaan	39 perusahaan	Belum Tercapai
		Jumlah peserta bimbingan teknis hubungan industrial			50 perusahaan	47 perusahaan	Belum Tercapai

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		ketenagakerjaan					
6	Program peningkatan kinerja administrasi perkantoran	Angka indeks kepuasan aparatur pelayanan administrasi perkantoran terhadap administrasi	80%	80%	80%	80%	Tercapai
	Penyediaan jasa perkantoran	Jumlah jasa administrasi perkantoran	9 jenis	9 jenis	11 jenis	11 jenis	Tercapai
	Penyediaan peralatan perkantoran	Jumlah jenis peralatan perkantoran	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	Tercapai
	Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	Tercapai
	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan	5 jenis	5 jenis	14 jenis	14 jenis	Tercapai
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	40 kali	40 kali			
		Jumlah dokumen laporan rapat rapat koordinasi dan konsultasi			45 dokumen	70 dokumen	Tercapai

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		ke luar daerah yang diikuti					
7	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Presentase aparatur SKPD mematuhi peraturan kedinasan	80%	80%	80%	80%	Tercapai
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	55 stel PDH, 6 stel PSR, 55 atasan batik tradisional	55 stel PDH, 6 stel PSR, 55 atasan batik tradisional	55 stel PDH, 6 stel PSR, 55 atasan batik tradisional	55 stel PDH, 6 stel PSR, 55 atasan batik tradisional	Tercapai
	Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti kompetensi	5 orang	5 orang	Seluruh pegawai	Seluruh pegawai	Tercapai
8	Program peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP SKPD	B	B	BB	0	Tercapai
	Koordinasi dan penyusunan perencanaan, pengendalian dan	Jumlah dokumen	9 dokumen	9 dokumen	6 dokumen	7 dokumen	Tercapai

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja perangkat daerah						
	Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen dan jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	9 dokumen	9 dokumen			
		Jumlah dokumen pengelolaan keuangan			9 dokumen	9 dokumen	Tercapai
		Prosentase penyerapan anggaran OPD (%)			95%	92,10%	Belum Tercapai

Sumber : DPM, PTSP dan Naker Tahun 2019

b. Perolehan Penghargaan / Prestasi

Adapun perolehan penghargaan / prestasi urusan wajib non pelayanan dasar kepemudaan dan olahraga yang telah diraih pada Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	ISO 9001 : 2015	British Assesment Bureau
2.	Pembina K3 terbaik pada acara Peringatan Bulan K3 Prov. Jatim.	Gubernur Jawa Timur
3.	Juara 2 Stand Terbaik pada Pameran Peluang Investasi, Perdagangan Pariwisata dan Produk Unggulan Daerah	Penyelenggara TRADE-VEST EXPO 2019

c. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dalam peningkatan urusan Perizinan, Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penyampaian informasi pasar kerja dan pembentukan bursa kerja khusus di beberapa sekolah.
- b. Masih banyaknya para pencari kerja yang belum mengikuti pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi
- c. Masih banyak LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) di Kabupaten Tuban yang belum terakreditasi.
- d. Belum tersebarluasnya informasi kegiatan transmigrasi di masyarakat.

- e. Dengan semakin banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial saat ini, masih kekurangan tenaga fungsional mediator hubungan industrial.
- f. Dengan beralihnya fungsi pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi maka wajib ketenagakerjaan di perusahaan sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 juga beralih ke Provinsi, hal tersebut berakibat pada data perusahaan dan jumlah tenaga kerja perusahaan bukan lagi menjadi kewajiban perusahaan untuk melaporkan ke DPM, PTSP dan Naker Kab. Tuban.
- g. Masih kurangnya kesadaran perusahaan dalam hubungan industrial yang harmonis dan mewujudkan penerapan K3 di Perusahaan.
- h. Keterbatasan pemohon mengakses aplikasi OSS karena pengetahuan teknologi informasi pemohon yang kurang.
- i. Kurangnya informasi tata cara alur dan persyaratan perizinan di wilayah kecamatan yang jauh dari kota.
- j. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki pemohon untuk mengakses aplikasi perizinan online.
- k. Keterbatasan petugas pelayanan perizinan.
- l. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan perizinan.
- m. Belum optimalnya promosi investasi.
- n. Belum optimalnya penyampaian LKPM.

2. Solusi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang telah dilakukan, antara lain :

- a. Mengadakan kegiatan sosialisasi IPK dan BKK ke sekolah-sekolah kejuruan secara bertahap.
- b. Menambahkan jumlah pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi.

- c. Mengadakan sosialisasi dan fasilitasi kepada LPK yang belum terakreditasi.
- d. Mengadakan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi transmigrasi kepada masyarakat.
- e. Penambahan PNS Sarjana diutamakan S1 Hukum untuk diusulkan mengikuti diklat fungsional mediator HI ke Kemenaker RI.
- f. Diperlukan tambahan anggaran untuk validasi data perusahaan dan jumlah tenaga kerja melalui kegiatan monev dan validasi data perusahaan dengan sistem jempot bola.
- g. Dilakukan pembinaan melalui kegiatan sosialisasi dan apresiasi terhadap perusahaan yang telah berkomitmen dalam melaksanakan hubungan industrial yang harmonis serta penerapan K3 di Perusahaan.
- h. Melakukan sosialisasi OSS pada kalangan pelaku usaha, masyarakat umum, baik melalui temu langsung, media sosial, media masa, papan pengumuman (billboard) dan menyediakan helpdesk di ruang pelayanan PTSP.
- i. Melakukan pelayanan perizinan keliling di kecamatan-kecamatan yang jauh dari Kota.
- j. Menyatukan seluruh pelayanan publik dalam satu gedung Mal Pelayanan Publik yang direalisasikan Tahun 2020.
- k. Menambah jumlah loket untuk pelayanan perizinan OSS dan menambah jumlah loket pelayanan komitmen perizinan OSS pada Mal Pelayanan Publik di Tahun 2020.
- l. Melakukan pemetaan potensi, peluang dan project investasi sebagai bahan promosi serta mengikuti forum bisnis agar lebih fokus dengan calon investor.
- m. Melaksanakan pembinaan, pemantauan serta pendampingan terhadap pelaku usaha dalam penyampaian LKPM

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban telah melaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Program yang telah mengalami kenaikan capaian jika dibandingkan dengan Tahun 2018.

Sedangkan untuk realisasi anggaran mencapai persentase 92,72%, sehingga kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban pada Tahun 2019 telah optimal dilaksanakan.

B. Saran

Dengan pelaksanaan pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban pada Tahun 2019 yang telah optimal dijalankan maka diharapkan dalam dilaksanakan perencanaan kegiatan di tahun-tahun selanjutnya lebih berinovasi lagi dengan azas efektif dan efisien serta berkontribusi secara langsung terhadap kemaslahatan masyarakat.

Tuban, Januari 2020

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TUBAN**

TADJUDIN TEBYO, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600827 198603 1 013